

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. :Bandung: Alfabeta
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pend/ekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harsono, Hanifah. (2002). *Implementasi kebijakan dan politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Islamy, M. Irfan. 2009, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kansil, C.S.T. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Labolo, muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakata: PT Raja Gravindo Persada
- Meter, Donald. S. Van & Carl. R. Van Horn 2005. *The Policy Implementation Process; A Conceptual Frame Work*, Beverly Hills Sage Publication Inc
- Mulyadi, Dedy. 2005. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex media Komputindo.
- Ndraha,Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2017. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 1998. Ekologi Pemerintahan. Jakarta: Pertja.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, S. Hessel Nogi 2003, Implementasi Kebijakan publik, Transformasi fikiran George Edward III. Jakarta : Kerjasama Lukman Ofset & yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Wahab, Solichin, Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementaasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2007. Teori & Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Dokumen Dan Sumber Lainnya:

Republik Indonesia 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

2006 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pend/aftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Provinsi Jawa Barat, 2010. *Peraturan Daerah No 1 Kabupaten Bandung Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1. Kabupaten Bandung Sekretaris Daerah.

Provinsi Jawa Barat, 2010 *Peraturan Bupati No 5 Kabupaten Bandung Tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung*. Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2010.

Provinsi Jawa Barat, 2016 *Peraturan Bupati No. 99 Kabupaten Bandung Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung*, Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 101 Tahun 2016